



Article Informations
Corresponding Email:
aldaasfr@gmail.com

Received: 03/08/2024; Accepted:
23/10/2024; Published: 23/10/2024

PERAN INTERNASIONAL LABOUR ORGANIZATION DALAM MENGATASI FENOMENA SEAFOOD SLAVERY DI THAILAND TAHUN 2019-2023

Alda Sapitri¹⁾, Angga Nurdin Rachmat²⁾, Muhammad
Fauzan Alamari³⁾

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad
Yani

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam menangani perbudakan di sektor perikanan Thailand dari tahun 2019 hingga 2023. Perbudakan di sektor perikanan mengacu pada perdagangan orang dan kerja paksa nelayan, sebuah isu kritis dalam industri seafood global. Studi ini menyelidiki upaya konkret yang dilakukan oleh ILO untuk meningkatkan perlindungan dan memerangi perbudakan di sektor perikanan Thailand. Dengan menggunakan kerangka teoritis liberalisme institusional, yang menekankan peran lembaga internasional dalam mempromosikan kerjasama dan menetapkan standar global, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti kontribusi ILO dalam mempromosikan kondisi kerja yang adil dan melindungi hak-hak pekerja. Dengan memeriksa intervensi ILO dan kolaborasinya dengan pemerintah Thailand, organisasi pekerja, dan bisnis, studi ini bertujuan untuk berkontribusi pada kesadaran global tentang masalah perbudakan di sektor perikanan, advokasi untuk peningkatan standar kerja global dan perlakuan yang adil terhadap pekerja di Thailand dan di seluruh dunia.

Kata Kunci: Perbudakan di Sektor Perikanan, Organisasi Internasional, Thailand

Abstract

This research explores the role of the International Labour Organization (ILO) in addressing seafood slavery in Thailand from 2019 to 2023. Seafood slavery refers to trafficking in persons and forced labor of fishers, a critical issue in the global seafood industry. The study investigates concrete efforts undertaken by the ILO to enhance protection and combat slavery in Thailand's fishing sector. Using the theoretical framework of institutional liberalism, which emphasizes the role of international institutions in promoting cooperation and setting global standards, the research aims to highlight ILO's contributions in promoting fair working conditions and protecting workers' rights. By examining ILO's interventions and collaborations with Thai government, worker organizations, and businesses, the study aims to contribute to global awareness of slavery issues in fisheries, advocating for improved global labor standards and fair treatment of workers in Thailand and worldwide.

Keywords: *Seafood Slavery, Internasional Organization, Thailand*

PENDAHULUAN

Isu kemanusiaan memiliki keterkaitan yang erat dengan kajian keamanan dalam hubungan internasional. Dimana berkaitan dengan kemampuan untuk bebas dari penganiayaan, pencapaian kehidupan yang baik dan kemampuan untuk menghasilkan kehidupan yang etis. Hal tersebut dicapai melalui upaya kolektif dan tanggung jawab bersama. Isu kemanusiaan dalam aspek hubungan internasional muncul sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang melibatkan institusi sebagai aktor disamping negara yang menaungi masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat mengalami aktivitas yang semakin luas dalam interaksi internasional, seperti migrasi, ataupun aktivitas ekonomi. Dimana tidak terbatas pada kedaulatan dan teritorial negaranya. Isu kemanusiaan dalam hubungan internasional pun semakin diperhatikan karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Diantaranya adalah pelanggaran kemanusiaan salah satunya dalam konteks perbudakan.

Dalam interaksi hubungan internasional, *International Labour Organization* (ILO) merupakan aktor internasional yang memainkan peran krusial dalam upaya mengatasi perbudakan di seluruh dunia. Sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-

Bangsa yang fokus pada masalah ketenagakerjaan, ILO telah berkomitmen untuk memajukan hak-hak pekerja dan menghapuskan bentuk-bentuk eksploitasi yang melibatkan perbudakan. ILO terlibat dalam pembuatan dan penegakan standar internasional untuk perlindungan pekerja, termasuk norma-norma yang menentang praktik perbudakan dan kerja paksa.

Perlu dipahami bahwa peran organisasi internasional menjadi sangat penting karena perbudakan modern yang dianggap sebagai tindakan yang merekrut atau mengangkut seseorang secara paksa dengan kekerasan, penipuan dan paksaan menjadi isu yang terus berkembang secara global. Korban dari perbudakan tersebut tidak mempunyai sarana untuk pergi atas kemauannya sendiri. Perbudakan modern paling sering terjadi di industri padat karya yang membutuhkan keterampilan rendah dan kurangnya pengaturan.

Perbudakan di sektor perikanan sendiri marak terjadi di kawasan Asia Tenggara, khususnya terjadi di Thailand. Negara ini merupakan negara yang rentan akan terjadinya perbudakan modern. Karena letak geografisnya yang langsung berbatasan dengan Myanmar, Laos, Kamboja, dan Malaysia yang menempatkan Thailand sebagai negara yang strategis untuk transit maupun melakukan tujuan perdagangan manusia yang berujung pada perbudakan modern. Perekonomian Thailand yang stabil membuat para pekerja migran tertarik untuk bekerja di Thailand yang berujung pada perbudakan modern. (Lediamelia, 2022) Di sektor perikanan ini di dominasi oleh pekerja migran yang di sebabkan kurang minatnya dan penolakan buruh domestik untuk bekerja di kapal- kapal ikan karena menghindari kondisi kerja yang kurang layak. Dan tuntutan produksi yang tinggi membuat terjadinya eksploitasi berlebihan (*over exploited fishing*) dan praktik *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* yang sistematis, serta pelanggaran hak asasi manusia. (Sofia, 2021) Korban dari perbudakan tersebut pun banyak diantaranya hasil dari perdagangan manusia, yang bahkan masih belum cukup umur

untuk bekerja. Karena menurut *work in fishing convention 188* usia minimal untuk bekerja sebagai awak kapal adalah 18 tahun.

Dalam satu dekade terakhir, laporan yang mendokumentasikan pelanggaran terhadap pekerja di sektor perikanan meningkat cukup tajam. Dimana dalam laporan tersebut disebutkan bahwa para pekerja dipaksa untuk bekerja dalam waktu yang tidak ditentukan dan menggunakan kekerasan ekstrem. Dalam laporan *dari the United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking* (UNIAP) mengemukakan bahwa 59% migran diperdagangkan untuk kemudian dipekerjakan di kapal penangkap ikan di Thailand. Bahkan disebutkan bahwa tidak hanya tindak kekerasan saja yang terjadi, namun juga pembunuhan yang kerap dilakukan oleh rekan kerjanya. (EJF)

Thailand mengalami krisis sumber daya ikan akibat peningkatan konsumsi dan permintaan yang masif. Dimana hal ini menyebabkan kapal-kapal harus berada di laut dalam jangka waktu yang lama untuk dapat berlayar lebih jauh. Hal ini berdampak kepada peningkatan biaya yang perlu dikeluarkan. Untuk menekan biaya produksi, para operator memilih untuk menggunakan jaringan perdagangan manusia yang berdampak kepada kerja paksa.

Industri perikanan Thailand menjadi sektor menguntungkan dalam dunia bisnis, yang kemudian bergantung dan perlu ditunjang oleh pekerja yang juga cukup besar jumlahnya. Untuk memangkas biaya tersebut, maka pilihan pekerja migran yang mudah untuk ditipu dan bekerja paksa menjadi pilihan yang menguntungkan. Terlebih tidak adanya atau lemahnya standar-standar dalam perekrutan ketenagakerjaan yang tidak menunjang keselamatan para pekerja. Disamping itu, sebagai bagian dari negara di kawasan Asia Tenggara, Thailand tergolong belum mampu menerapkan tata kelola efektif pada sektor perikanan yang sepatutnya disertai dengan penegakan hukum yang efektif. Hal ini memicu meluasnya penggunaan tenaga kerja budak. Dimana menyebabkan meningkatkan kerentanan

dalam kerja paksa dan perdagangan manusia dalam sektor perikanan di negara tersebut. Oleh karena itulah ILO berupaya untuk terus bekerja sama dengan pemerintah, organisasi pekerja, dan pengusaha Thailand untuk mendorong implementasi kebijakan dan praktik ketenagakerjaan yang adil dan layak, menciptakan lingkungan di mana perbudakan sulit berkembang. (ILO)

Oleh karena itulah ILO yang memang memiliki tanggung jawab untuk ikut campur dalam isu perbudakan di suatu negara karena misi inti organisasi untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dihormati dan dilindungi di seluruh dunia memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pemberantasan isu perbudakan di sektor perikanan Thailand, terlebih pasca langkah penanganan dari negara tersebut masih terbilang kurang. (EJF) Terlebih Perbudakan merupakan bentuk ekstrem dari pelanggaran HAM dan pelanggaran terhadap standar kerja yang layak sehingga sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ILO. Upaya bantuan yang diberikan ILO adalah salah satu cara untuk secara aktif mengakhiri praktik perbudakan modern dan memastikan perlindungan yang memadai bagi pekerja yang rentan di seluruh dunia.

Dengan demikian, intervensi ILO dalam isu perbudakan di sektor perikanan Thailand merupakan bagian dari upaya organisasi tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan dan keadilan sosial yang mendasari eksistensinya secara global mengingat perbudakan ini juga terjadi di perairan yang bersifat lintas batas negara. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat peran ILO dalam menangani isu tersebut di negara Thailand yang dianggap sebagai salah satu sumber terjadinya perbudakan di sektor perikanan di dunia. Perlu dipahami pula bahwa dalam konteks kebijakan luar negeri, Thailand memang memiliki komitmen untuk bekerja secara aktif di organisasi-organisasi dibawah naungan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dan organisasi regional untuk menjaga perdamaian dan keamanan, mendorong proses demokrasi, hak asasi manusia,

paham kemanusiaan, lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, serta bekerja sama untuk mengatasi semua masalah transnasional yang mempengaruhi keamanan manusia.(OAS)

Penelitian ini difokuskan pada periode waktu 2019 hingga 2023 atau 4 tahun. Pembatasan periode tersebut diambil karena ILO sebagai organisasi internasional, menyatakan komitmen mereka untuk mengatasi isu tersebut pada rapat pleno perdana Forum Asia Tenggara untuk Mengakhiri Perdagangan Manusia dan Kerja Paksa Nelayan (*SEA Forum for Fishers*) pada tahun 2019 sampai dengan perkembangannya hingga tahun 2023 atau dalam durasi 4 tahun mengingat organisasi ILO sendiri dalam dokumen GAPfish menetapkan bahwa program kerja mereka dalam mengatasi isu perbudakan di sektor perikanan akan dijalankan dalam periode 4 tahunan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Liberalisme, konsep organisasi internasional, dan teori peranan organisasi internasional yang menjadi fokus utama dari penelitian ini, dalam melihat peran ILO dalam mengatasi pemberantasan perbudakan bagi nelayan di Thailand. Liberalisme institusional sebagai landasan utama. Karena pendekatan tersebut dapat menjelaskan fenomena atau masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Pendekatan liberalis institusional juga merupakan pendekatan yang memang mengakui bahwa organisasi internasional merupakan bagian dari aktor dalam hubungan internasional. Untuk meningkatkan kerja sama antara negara-negara, keberadaan institusi internasional dimaksudkan untuk mengatur negara anggotanya sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama, bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama.

Le Roy A. Bannet menyatakan bahwa organisasi internasional pada awalnya didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan

masing-masing negara terjamin dalam konteks hubungan internasional. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk sebagai wadah kerjasama suatu negara untuk menjamin kepentingan negara-negara anggotanya. Berdasarkan pemahaman terkait peran dan organisasi internasional yang menjadi fokus dalam penelitian ini untuk menganalisa peran organisasi internasional ILO dalam permasalahan perbudakan di sektor perikanan dan pengolahan seafood Thailand, maka peneliti memilih untuk menggunakan konsep peran organisasi internasional oleh Clive Archer dimana konsep yang dikemukakan berisikan tiga peran utama dari organisasi internasional yakni sebagai instrumen, arena dan aktor.

Peneliti memilih metode penelitian kualitatif karena tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) tentang bagaimana peran dari *international labour organization* (ILO) dalam mengatasi fenomena *seafood slavery* di Thailand. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Metode kualitatif membantu mendapatkan deskripsi fenomena yang lengkap, dan juga meningkatkan pemahaman tentang makna suatu kejadian. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak hanya bertujuan untuk peneliti mendapatkan gambaran dan penjelasan, tetapi juga membantu mendapatkan suatu penjelasan yang lebih terperinci. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diamati subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara keseluruhan, bukan hanya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, tetapi juga dalam lingkungan alami dan dengan menggunakan berbagai teknik.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian analisis data deskriptif kualitatif. Dalam pandangan Sukmadinata, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan fenomena, seperti kondisi atau hubungan antara dua hal.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik yang berasal dari alam maupun buatan manusia, seperti bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena. (Drs. Yanuar Ikbar)

PEMBAHASAN

1) Peran ILO sebagai Instrument

Sebagai instrumen, *International Labour Organization* (ILO) memainkan peran krusial dalam menangani masalah perbudakan di industri seafood Thailand melalui berbagai upaya, termasuk pengawasan dan evaluasi melalui penyusunan standar dan panduan kebijakan, serta bantuan teknis melalui kerjasama internasional untuk meningkatkan kondisi kerja dan awareness bagi pelaku perikanan di negara tersebut. ILO menyediakan kerangka kerja yang diadopsi oleh pemerintah Thailand guna memperbaiki regulasi ketenagakerjaan dan memperkuat penegakan hukum terhadap praktik eksploitasi. Selain itu, ILO juga mendukung program pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan pekerja dalam mengenali hak-hak mereka. Dengan berkolaborasi bersama pemerintah, LSM, dan sektor swasta, ILO berkontribusi signifikan dalam mendorong perubahan sistemik yang lebih adil dan manusiawi di sektor perikanan Thailand, serta memajukan standar ketenagakerjaan internasional.

Sebagai instrumen dan dalam konteks pengawasan dan evaluasi, *International Labour Organization* (ILO) bertindak sebagai alat utama untuk menetapkan standar internasional yang bertujuan menghapuskan praktik perbudakan di industri *seafood* di Thailand. ILO telah mengembangkan berbagai konvensi dan rekomendasi yang dirancang untuk melindungi pekerja dari eksploitasi dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Salah satu konvensi penting adalah Konvensi Kerja Paksa No. 29, yang mengharuskan negara anggota, termasuk Thailand, untuk melarang dan memberantas semua bentuk kerja paksa

atau perbudakan modern. Selain itu, Konvensi tentang Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga No. 189 dan Protokol 2014 untuk Konvensi Kerja Paksa juga merupakan instrumen penting yang memperkuat komitmen global untuk melindungi pekerja dari segala bentuk eksploitasi.(ILO)

Konvensi ini sebagai Instrumen internasional yang memberikan perlindungan hukum kepada pekerja yang rentan terhadap eksploitasi sebagai tenaga kerja kontrak asing sementara, yang dirugikan oleh hierarki ras dan gender, dan yang secara tradisional telah dikecualikan dari perlindungan undang-undang tenaga kerja domestik. Di sejumlah negara yang semakin banyak meratifikasi Konvensi ILO tentang Pekerja Rumah Tangga dan Rekomendasinya, standar internasional ini penting karena mereka menangani kesenjangan kebijakan publik yang telah berlangsung lama dalam masalah ini.(Wilson)

Sejauh ini, Thailand telah meratifikasi 20 Konvensi dan 1 Protokol terkait dengan regulasi buruh dibawah ILO, Hal ini dikarenakan kesadaran bahwa pekerja migran merupakan bagian integral dari ekosistem tenaga kerja Thailand, memengaruhi kondisi kerja dan perekonomian domestik. Oleh karena itu, mereka seharusnya mendapatkan perlindungan yang sama terhadap kondisi kerja dan ketenagakerjaan sesuai dengan undang-undang Thailand seperti halnya warga Thailand. Namun, masih terdapat ketidaksetaraan antara pekerja nasional dan migran terkait pendapatan dan hak untuk membentuk serikat pekerja. Thailand terus mendapat pertanyaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan hak ketenagakerjaan. Negara ini telah mengeluarkan laporan untuk menjelaskan pengabaian terhadap pelanggaran hak-hak tenaga kerja tersebut karena Thailand tidak hanya tidak mematuhi undang-undang hak asasi manusia, tetapi juga belum meratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* dan Konvensi No. 87 dan No. 98 dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Sejalan dengan Liberalisme institusional yang menekankan bahwa institusi internasional seperti ILO memainkan peran penting dalam menciptakan kerjasama global yang efektif untuk mengatasi isu-isu kritis seperti perbudakan di industri perikanan di Thailand. Keberadaan konvensi-konvensi seperti C029 - Forced Labour Convention, 1930 dan P029 - Protokol 2014 untuk Forced Labour Convention, 1930 menunjukkan bahwa ILO menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk melarang dan menghapus kerja paksa. Konvensi-konvensi ini tidak hanya menetapkan standar minimum tetapi juga mendorong negara-negara anggota, termasuk Thailand, untuk mengadopsi dan mengimplementasikan langkah-langkah yang lebih ketat dalam hukum domestik mereka. Dalam konteks ini, ILO berfungsi sebagai instrumen yang menetapkan norma-norma internasional dan memandu negara-negara dalam upaya mereka untuk memperbaiki regulasi tenaga kerja.

Dalam konteks bantuan teknis ke Thailand, ILO bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa regulasi nasional sesuai dengan standar internasional yang telah ditetapkan. ILO menyediakan panduan teknis dan bantuan untuk membantu Thailand dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif untuk mengatasi perbudakan di sektor perikanan. Misalnya, ILO membantu dalam penyusunan undang-undang yang lebih ketat tentang perlindungan tenaga kerja dan peraturan yang mengatur kondisi kerja di kapal-kapal penangkap ikan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi domestik tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui standar minimum yang ditetapkan oleh konvensi ILO.

Penetapan dan implementasi standar internasional oleh ILO dalam sektor perikanan Thailand tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kondisi kerja tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip liberalisme dalam hubungan internasional. Liberalisme menekankan pentingnya institusi internasional dalam memfasilitasi kerjasama antar negara dan

menciptakan aturan yang adil dan mengikat. Dengan membantu Thailand meratifikasi dan menerapkan konvensi seperti Konvensi Kerja Paksa No. 29 dan Konvensi Kerja di Sektor Perikanan No. 188, ILO berfungsi sebagai instrumen yang mempromosikan nilai-nilai ini. Institusi internasional seperti ILO tidak hanya mengatur perilaku negara-negara anggotanya tetapi juga menyediakan platform untuk dialog dan kerjasama yang konstruktif. Hal ini menunjukkan bahwa melalui kerjasama internasional dan penerapan standar global, negara-negara dapat bekerja bersama untuk mengatasi tantangan global seperti perbudakan dan eksploitasi pekerja, yang pada gilirannya memperkuat tata kelola global yang lebih manusiawi dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip liberalisme.

2) Peran ILO sebagai Arena

Sebagai arena, International Labour Organization (ILO) menyediakan platform di mana berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi pekerja, dan pengusaha, dapat berdialog dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi perbudakan di industri seafood di Thailand. ILO berfungsi sebagai forum di mana masalah-masalah ketenagakerjaan dibahas secara terbuka dan solusi-solusi yang inovatif dapat dikembangkan melalui konsensus. ILO menyelenggarakan berbagai konferensi, pertemuan, dan lokakarya yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

Di sini, mereka dapat berbagi pengalaman, belajar dari praktik terbaik, dan membangun jaringan kerja sama yang kuat. Misalnya, dalam konteks perbudakan di industri seafood Thailand, ILO sering mengadakan diskusi panel dan lokakarya yang melibatkan perwakilan dari pemerintah Thailand, LSM, serikat pekerja, dan perusahaan-perusahaan perikanan. Ini menciptakan kesempatan untuk membahas tantangan yang dihadapi dan mencari solusi bersama. Selain itu, sebagai arena, ILO juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi negosiasi dan mediasi. Ini memungkinkan adanya dialog konstruktif antara pihak-pihak yang mungkin memiliki

kepentingan atau pandangan yang berbeda mengenai isu-isu ketenagakerjaan.

Perdagangan manusia dalam industri perikanan dan makanan laut telah menjadi masalah serius di Asia Tenggara, khususnya di negara-negara pengekspor utama seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Filipina. Untuk mengatasi masalah ini, ILO melalui Proyek Perikanan SEA dengan dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, mengorganisir Inaugural Plenary Meeting of the SEA Forum for Fishers di Bali pada 25-27 September 2019. Pertemuan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan keanggotaan, penasehat teknis, struktur, dan protokol operasional forum, serta menyusun rencana kerja untuk menangani masalah eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia di sektor perikanan.(ILO)

Pertemuan ini juga memfasilitasi diskusi dan pertukaran informasi antara negara-negara ASEAN mengenai perjanjian bilateral, regional, dan multilateral terkait pekerja migran di sektor perikanan. ILO menyediakan platform bagi para ahli dari seluruh kawasan untuk melanjutkan diskusi yang telah berlangsung di lima kelompok kerja forum. Selain itu, forum ini menjadi wadah untuk mempromosikan Konvensi Pekerjaan di Perikanan dan alat-alat yang dikembangkan untuk implementasi standar ketenagakerjaan internasional dan penegakan perlindungan tenaga kerja bagi pekerja perikanan.(ILO)

Pada pertemuan ini, perwakilan dari pemerintah, organisasi pekerja, dan sektor swasta membahas strategi untuk meningkatkan kondisi kerja di industri perikanan dan berbagi praktik terbaik dalam memerangi perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja. Kesimpulan yang diadopsi pada forum ini merekomendasikan pembentukan badan koordinasi regional multi-pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dalam melawan perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, dan perbudakan dilaut.

Rapat tersebut juga membahas kondisi tenaga kerja

yang dieksploitasi di sektor perikanan. Ilyas Pangestu dari Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) menyoroti kasus kerja paksa yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di luar negeri dan menyerukan koordinasi yang lebih baik dari semua pemangku kepentingan terkait. Rene Roberts dari ILO menekankan pentingnya peran inspektur ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja, termasuk di sektor perikanan. Rapat ini merekomendasikan penguatan inspeksi protokol kesehatan dan keselamatan kerja (OSH) di kapal perikanan selama pandemi COVID-19 dan melibatkan pekerja serta pengusaha dalam proses inspeksi ketenagakerjaan.

Dengan demikian, peran International Labour Organization (ILO) sebagai arena dalam mengatasi perbudakan dan eksploitasi tenaga kerja di sektor perikanan, terutama di Asia Tenggara, menjadi krusial dalam konteks hubungan internasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip liberalisme. Melalui konferensi, pertemuan, dan lokakarya yang diadakan, ILO berhasil memfasilitasi dialog konstruktif dan kerjasama multilateral antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha untuk mengembangkan solusi inovatif dan harmonisasi kebijakan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan koordinasi regional dalam melawan perdagangan manusia dan kerja paksa, tetapi juga mengukuhkan peran ILO sebagai arena utama dalam mempromosikan perlindungan hak asasi manusia dan kondisi kerja yang layak di Thailand.

ILO juga menyelenggarakan Ship to Shore Rights Project di Thailand yang didukung oleh European Union. Di Thailand, industri perikanan dan pengolahan seafood menghadapi masalah serius terkait hak asasi manusia dan ketenagakerjaan, di mana lebih dari seperempat pekerja dibayar di bawah upah minimum. Lebih dari setengah tenaga kerja di sektor ini adalah pekerja migran dari negara-negara tetangga seperti Kamboja dan Myanmar, banyak di antaranya dieksploitasi tanpa kontrak yang layak atau menjadi korban perdagangan manusia. Ship to Shore Rights Project ini bertujuan utama untuk mencegah dan mengurangi kerja paksa serta eksploitasi pekerja, terutama

pekerja migran, dalam industri perikanan dan pengolahan seafood Thailand. Proyek ini bekerja sama dengan pemerintah, organisasi pekerja, dan masyarakat sipil untuk memperkuat perlindungan hukum dan standar ketenagakerjaan, dengan langkah-langkah konkret seperti memperkuat kerangka kebijakan untuk memfasilitasi migrasi reguler dan meningkatkan kondisi kerja, serta memberikan layanan dukungan melalui inisiatif masyarakat sipil dan serikat pekerja.

Dalam prosesnya, ILO bekerja sama dengan pemerintah Thailand untuk mengembangkan dan memperkuat kebijakan serta regulasi yang melindungi pekerja di sektor perikanan. Ini termasuk penetapan standar kerja yang sesuai dengan Konvensi ILO, khususnya terkait dengan waktu kerja, upah yang adil, dan kondisi kerja yang aman. ILO juga mendukung pembentukan dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengatasi praktik-praktik eksploitatif seperti kerja paksa dan perdagangan manusia.

Salah satu fokus utama dari proyek ini adalah memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pekerja, majikan, dan petugas penegak hukum. ILO menyediakan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak pekerja dan bagaimana melindunginya. Pelatihan ini juga mencakup cara mengenali dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia. Melalui inisiatif ini, pekerja diberdayakan untuk mengenali hak mereka dan mendapatkan akses ke mekanisme perlindungan yang ada.

Program "Ship to Shore Rights" dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), serikat pekerja, dan sektor swasta. ILO berperan sebagai fasilitator dalam membangun kemitraan yang kuat untuk mempromosikan praktik kerja yang adil dan manusiawi. Dengan menggabungkan upaya berbagai pihak, ILO membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih berkelanjutan dan beretika.

Selain upaya di tingkat kebijakan, ILO juga

menyediakan dukungan langsung kepada pekerja yang terdampak. Ini mencakup layanan pendampingan, bantuan hukum, dan akses ke program rehabilitasi bagi korban kerja paksa dan perdagangan manusia. Dengan cara ini, ILO tidak hanya bekerja untuk mencegah pelanggaran di masa depan, tetapi juga memberikan bantuan konkret kepada mereka yang telah menjadi korban.

3) Peran ILO sebagai Aktor

Sebagai aktor, ILO memainkan peran penting dalam menetapkan standar ketenagakerjaan internasional untuk meningkatkan kondisi kerja dan melindungi hak-hak pekerja secara global. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai organisasi internasional yang didedikasikan untuk mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia di tempat kerja, ILO merumuskan konvensi dan rekomendasi yang menetapkan norma minimum untuk berbagai aspek ketenagakerjaan seperti upah, jam kerja, keselamatan kerja, dan hak untuk berserikat dan terlibat dalam perundingan bersama. Proses penetapan standar melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah, pengusaha, dan pekerja, yang menghasilkan standar komprehensif yang melayani berbagai pemangku kepentingan. Selain menetapkan standar ketenagakerjaan, ILO juga terlibat dalam peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat nasional dan lokal.

Lebih lanjut, dengan menawarkan bantuan teknis dan dukungan pengembangan kapasitas kepada negara-negara anggota, ILO membantu memperkuat lembaga ketenagakerjaan seperti kementerian ketenagakerjaan, badan inspeksi, dan organisasi pekerja dan pengusaha. Melalui pelatihan, penelitian, dan inisiatif bantuan teknis, ILO membantu negara-negara dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk menegakkan standar ketenagakerjaan internasional, menangani pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan, dan mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan ini penting untuk

memastikan penerapan standar kerja yang dikembangkan secara efektif, memberikan perlindungan sejati bagi pekerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Sebagai aktor, International Labour Organization (ILO) secara aktif terlibat dalam upaya praktis untuk menghapus perbudakan di industri seafood di Thailand. ILO tidak hanya bertindak sebagai fasilitator atau mediator, tetapi juga mengambil langkah konkret dalam membantu negara dan organisasi lokal untuk mengimplementasikan standar ketenagakerjaan internasional. ILO berperan dalam memberikan dukungan teknis dan pelatihan kepada pemerintah Thailand dan pemangku kepentingan lainnya. Dukungan ini mencakup penyusunan undang-undang yang sesuai dengan standar internasional, pengembangan program-program pelatihan bagi petugas penegak hukum, dan penyediaan sumber daya untuk memperkuat kapasitas institusional dalam memerangi kerja paksa. Sebagai contoh, ILO telah membantu dalam pengembangan kurikulum pelatihan untuk petugas pengawas tenaga kerja di Thailand, yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi dan menindak kasus-kasus perbudakan. Selain itu, ILO terlibat langsung dalam proyek-proyek lapangan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kerja di sektor perikanan. Proyek-proyek ini mungkin termasuk kampanye kesadaran publik, program perlindungan dan rehabilitasi bagi korban kerja paksa, serta inisiatif untuk memperbaiki rantai pasokan industri seafood. Dalam konteks Thailand, ILO telah bekerja sama dengan berbagai LSM lokal untuk menyediakan layanan pendukung bagi pekerja migran yang rentan terhadap eksploitasi.

Semua hal tersebut menunjukkan bahwa peran International Labour Organization (ILO) sebagai aktor organisasi internasional tercermin dan tertuang dalam implementasi Decent Work Country Programme (DWCP) for Thailand 2023-27. Program ini menggariskan area utama

kerjasama antara ILO dan para konstituen pemerintah, pengusaha, dan pekerja di Thailand. Penandatanganan program ini pada 28 Februari 2024 menunjukkan komitmen kolektif untuk mempromosikan pekerjaan layak dan produktif bagi semua. Hal ini mencakup kesiapan pasar tenaga kerja, perlindungan sosial, dan penguatan kapasitas pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk mendukung pekerjaan layak, dengan tujuan akhir mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

DWCP 2023-2027 berfokus pada tantangan yang dihadapi oleh Thailand seperti perubahan demografis dan masalah lingkungan. Program ini bertujuan mengatasi penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja dan ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan melalui pembelajaran seumur hidup dan peningkatan layanan ketenagakerjaan publik. Selain itu, DWCP mendorong penciptaan "green jobs" untuk pembangunan berkelanjutan di sektor seperti pariwisata dan pertanian, serta meningkatkan akses digital dan keterampilan untuk inklusivitas yang lebih besar. Fokus ini menunjukkan bagaimana ILO berperan dalam membantu Thailand menavigasi perubahan pasar kerja global dan domestik.(ILO)

Lebih lanjut dalam upaya penguatan kelembagaan, ILO terus berupaya mengatasi ketidaksetaraan gender di tempat kerja, diskriminasi dalam perekrutan dan upah, serta meningkatkan akses pendidikan dan pekerjaan bagi kelompok rentan termasuk pekerja migran, DWCP 2023-2027 menargetkan perubahan sistemik. Program ini menyoroti pentingnya kesetaraan dan inklusi dalam pasar kerja Thailand, mencerminkan komitmen ILO terhadap standar ketenagakerjaan internasional dan perbaikan kualitas hidup pekerja. Ini menunjukkan bagaimana ILO memfasilitasi kebijakan inklusif yang mendukung pekerja dari berbagai latar belakang.

DWCP 2023-2027 juga berkomitmen untuk memperkuat sistem perlindungan sosial, memperluas cakupan bagi pekerja informal, dan memastikan perlindungan inklusif untuk semua

melalui penguatan sistem jaminan sosial. Dalam konteks ini, ILO berfungsi sebagai actor untuk ikut terjun langsung dalam kolaborasi antara pemerintah, organisasi pekerja, dan pengusaha, mendukung adopsi dan implementasi konvensi utama yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, perundingan kolektif, dan keselamatan serta kesehatankerja. Melalui program ini, ILO tidak hanya mendukung Thailand dalam mengatasi tantangan ketenagakerjaan tetapi juga mempromosikan praktik terbaik internasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Maka dari itu, Dalam konteks ini, ILO berperan sebagai aktor yang memfasilitasi aliran informasi dan negosiasi, meningkatkan kapabilitas pemerintah dalam memantau pelaksanaan komitmen, serta memperkuat keyakinan terhadap stabilitas kesepakatan internasional. Melalui program seperti Decent Work Country Programme (DWCP) for Thailand 2023-2027, ILO menunjukkan bagaimana institusi internasional dapat mempromosikan kerja sama multilateral yang efektif dan inklusif, menciptakan mekanisme untuk memperkuat perlindungan pekerja, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan liberalisme institusional ini menunjukkan bahwa kerjasama internasional yang difasilitasi oleh institusi seperti ILO adalah kunci untuk mengatasi tantangan global dalam bidang ketenagakerjaan dan hak asasi manusia.

Seperti telah dijelaskan pula pada bagian-bagian sebelumnya bahwa penguatan kelembagaan di Thailand untuk mengatasi isu seafood slavery dilakukan oleh ILO melalui berbagai inisiatif strategis yang berfokus pada peningkatan kapasitas institusi lokal. ILO bekerja sama dengan pemerintah Thailand dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi pekerja di industri perikanan. Ini termasuk revisi undang-undang ketenagakerjaan dan perikanan untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja, penghapusan praktik kerja paksa, dan peningkatan standar kerja. ILO juga membantu

dalam pengembangan mekanisme pemantauan dan penegakan hukum yang lebih efektif, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pengawas ketenagakerjaan agar mampu mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus perbudakan modern.

Kemudian ILO mendukung penguatan kapasitas kelembagaan melalui program-program pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan institusi dalam mengimplementasikan dan menegakkan kebijakan serta meningkatkan pemahaman tentang hak-hak pekerja dan praktik kerja yang adil. ILO juga memfasilitasi dialog sosial antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha untuk mendorong kolaborasi yang konstruktif dalam menangani isu-isu ketenagakerjaan. Melalui dialog ini, berbagai pihak dapat bersama-sama mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi perbudakan di sektor perikanan.(ILO)

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran International Labour Organization (ILO) dalam mengatasi masalah perbudakan di industri perikanan di Thailand masih menghadapi tantangan yang signifikan. Pendekatan liberalisme institusional menunjukkan bahwa keberadaan dan peran institusi internasional seperti ILO adalah krusial dalam meningkatkan kerjasama antar negara untuk mengatasi isu-isu global. ILO diharapkan dapat memfasilitasi aliran informasi, memperkuat kapabilitas pemerintah, dan meningkatkan stabilitas kesepakatan internasional melalui berbagai inisiatif dan program. Namun, dalam konteks industri *seafood* di Thailand, kompleksitas masalah perbudakan, termasuk tingginya permintaan pasar global terhadap produk *seafood*, menghambat efektivitas ILO dalam mencapai tujuannya.

Selama periode 2019-2023, ILO telah berperan sebagai instrumen, arena, dan aktor melalui program-program seperti *Sea Forum For Fisher* tahun 2019, *Ship To Shore Rights Projrct* pada tahun 2020, *Decent Work Country Programme (DWCP) for Thailand 2023*, yang berfokus pada peningkatan standar ketenagakerjaan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan pekerja. ILO juga aktif dalam memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan penyusunan kebijakan kepada pemerintah Thailand dan pemangku kepentingan terkait. Meskipun upaya ini telah memperkuat kapasitas lokal dalam menangani isu perbudakan, dampaknya terhadap penurunan signifikan kasus perbudakan di sektor perikanan masih belum terasa secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun ada kemajuan, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

Kesimpulannya, peran ILO sebagai institusi internasional tetap relevan dan penting dalam upaya mengatasi perbudakan di industri perikanan Thailand. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih signifikan, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan adaptif, yang mampu mengatasi dinamika lokal dan tantangan global. Ini termasuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan benar-benar efektif dalam melindungi hak-hak pekerja dan memberantas praktik-praktik eksploitatif. Dengan demikian, ILO dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator kerjasama internasional yang bertujuan mencapai keadilan sosial dan ketenagakerjaan yang layak bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

Archer, Clive. (2001). *International Organization*. Routledge, ISBN 9780415614764.

Anti-Slavery International. *What is modern slavery*.

Diakses dari <https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/>

Attina, Fulvio. (2016). *Traditional Security Issues*.

Anna Casey, (2022). "Promoting Fair Labor for Migrant Workers in Thailand's Seafood Supply Chain". *Resonance Global*. 23 Mei 2022.

Bannet, Le Roy A. (2001). *International Organization: Principles and Issue*.
New York : Pearson.

Burchill, Scott & Linklater, Andrew. *Teori-Teori Hubungan Internasional*". (Bandung: Nusa Media, 2009) 37.

Capan, Seynep Gulsah. Grovogui, Siba N. Amy Niang & Zambrano, Giulianna (2019) *International Relations and the Human: A Commentary*

Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 266.

Environmental Justice Foundation (EJF). (2023). *Thailand's Seafood Slaves*.

Gazisulin, Aydar. (2016). *The Significance of the 'Human Security' Paradigm in International Politics*.

"Guide to International Labour Standards and Rights at Work concerning Young People", (2017). International Labour Standards Department. Swiss: Jenewa.

"Hidden Chains: Rights Abuses and Forced Labor in Thailand's Fishing Industry". (2018). Human Right Watch. *Online*.
Diakses dari

"Home-based workers: Decent work and social protection through organization and empowerment". (2015). International Labour Organization. Indonesia: Jakarta

"ILO Declaration On Fundamental Principles And Rights At Work And Its Follow-Up". (1998). International Labour Organization. Switzerland

"ILO supervisory system/mechanism", International Labour Organization.

Online. Diakses dari <https://www.ilo.org/about-ilo/how-ilo-works/ilo-supervisory-systemmechanism>

International Labour Office. *Forced Labour and Human Trafficking in Fisheries*. Diakses dari
<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/>-

--ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_216003.pdf,

“International Labour Conference”. International Labour Organization.

Online. Diakses dari <https://www.ilo.org/about-ilo/how-ilo-works/international-labour-conference>

“International Labour Organization Facts”, *online*, diakses dari <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1969/labour/facts/>

International Labour Organization. *Forced labour and human trafficking in fisheries*". Diakses dari <https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/policy-areas/fisheries/lang-en/index.htm>

International Labour Organization. *Southeast Asia to strengthen efforts to end human trafficking and forced labour in the fishing industry*.

Jackson, Robert & Sorensen, Georg. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*.

Kuniarty, R & Kurniawan, A. (2020). *Another threat to the Sovereignty of Indonesia's territorial waters: Human trafficking in the fisheries industry*

Ladiamelia, Radina Fitri. (2022). *Fungsi International Labour Organization (ILO) Dalam Menangani Perbudakan Modern di Industri Perikanan Thailand, 2015-2019*.

Mendoza, Martha., McDowell, Robin., Mason, Margie., Htusan, Esther., dan the Associated Press (2016). *Fishermen Slaves: Human Trafficking and the Seafood We Eat*. Miami: Mango Media & Associated Press. 8.

Miles, Matthew B. & Huberman, Michael A. Huberman. (1994). *Qualitative Data Analisis*. London. Sage Publications.

Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm 6-7.

Oktariani, Puput & Suhermanto, Dedik Fitra. (2022). *Upaya ILO dalam mengatasi Permasalahan Kerja Paksa ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing*

“Royal Thai Government’s Country Report on Anti-Human Trafficking Effort”. (2022). ASEAN Act Partnership Hub

Siswandi, Achmad Gusman. (2022). *Isu-Isu Kontemporer Mengenai Hak Asasi Manusia di Laut: Keadilan Laut (Ocean*

Equity dan Kapal Laut Nirawak (Maritime Autonomous Surface Ship). Jurnal Poros Hukum Padjajaran.

Sugiyono. (2011). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm 222.

Tickler, David et all. *Modern Slavery and the Race to Fish*.